

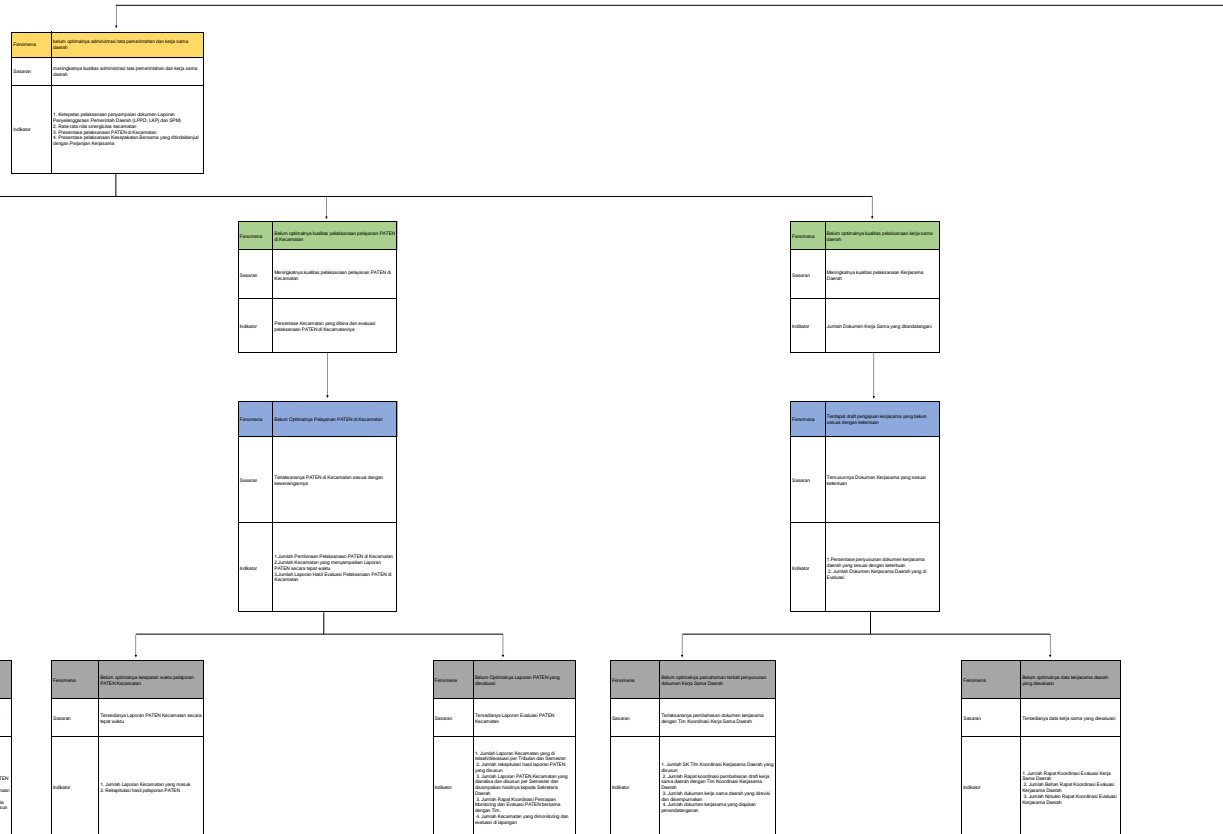
LEVEL 1 KEBERHASILAN DASAR

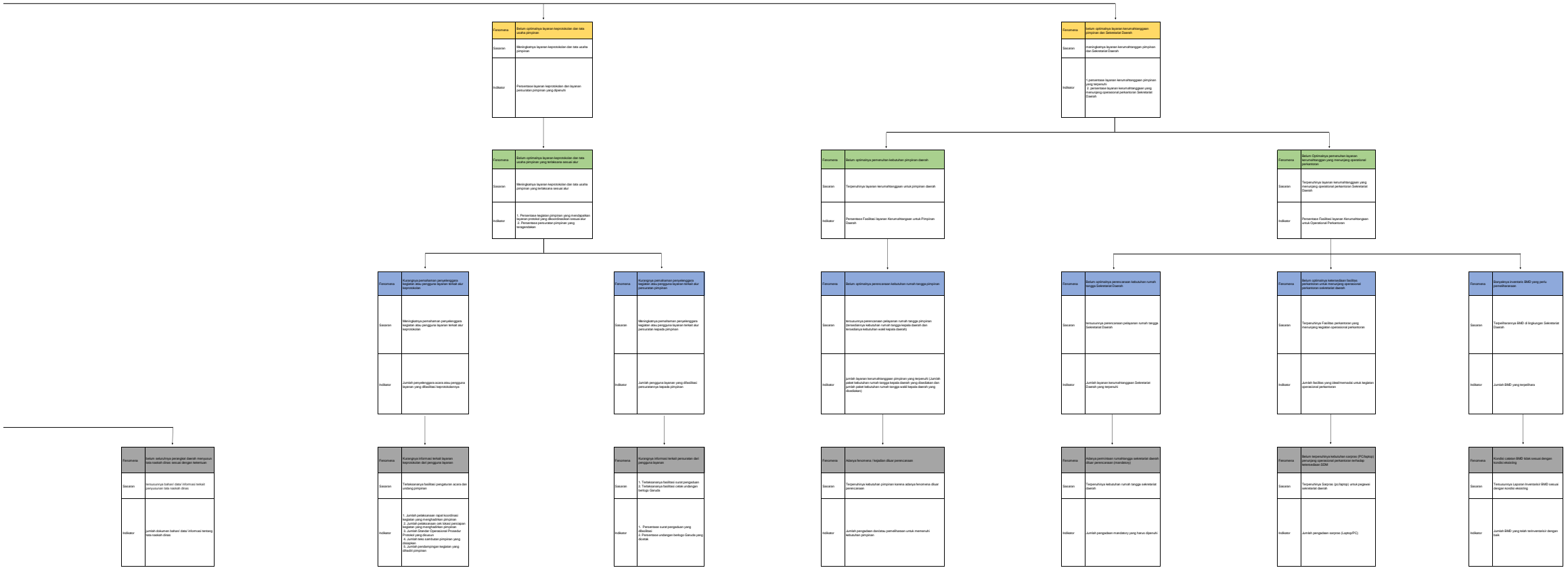
LEVEL 2 PROGRAM

LEVEL 3 KEGIATAN

LEVEL 4 SUB KEGIATAN

LEVEL 5 AKTIVITAS





LEVEL 1 KEPALA PERANGKAT DAERAH

Fenomena	Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Hasil Penilaian ITKP Tahun 2022 Nilainya 22,6 dan 2023 =19,69)
Sasaran	Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan
Indikator	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Fenomena	Masih Rendahnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) (Hasil Penilaian ITKP Tahun 2022 Nilainya 1,1, dan 2023 = 5,56)
Sasaran	Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Indikator	Persentase Pemenuhan SDM PBJ yang Telah Tersertifikasi

Fenomena	Belum Optimalnya Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (Hasil Penilaian ITKP Tahun 2022 adalah 9,9 dan 2023 = 31,11)
Sasaran	Optimalnya Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Indikator	Nilai Maturitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

LEVEL 2 PROGRAM

Fenomena	Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah Terhadap Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
Sasaran	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Daerah Terhadap Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Fenomena	Masih Rendahnya Pemenuhan Kebutuhan JF PBJ
Sasaran	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan JF PBJ
Indikator	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan JF PBJ

Fenomena	Belum Optimalnya Capaian Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sasaran	Meningkatnya Capaian Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator	Tingkat Capaian Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

LEVEL 3 KEGIATAN

Fenomena	Belum Optimalnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Fenomena	Belum Terpenuhnya Jumlah JF PBJ
Sasaran	Meningkatnya Jumlah JF PBJ
Indikator	Jumlah JF PBJ

Fenomena	Belum Optimalnya Capaian Domain Proses
Sasaran	Meningkatnya Capaian Domain Proses
Indikator	Nilai Domain Proses

LEVEL 4 SUB KEGIATAN

Fenomena	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sasaran	Meningkatnya Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator	Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa

Fenomena	Belum Optimalnya Pelatihan JF PBJ
Sasaran	Meningkatnya Pelatihan JF PBJ
Indikator	Jumlah yang Mengikuti Pelatihan

Fenomena	Belum Optimalnya Pemenuhan Bukti Dukung Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Sasaran	Meningkatnya Pemenuhan Bukti Dukung Unit Kerja Pengelolaan Barang dan Jasa
Indikator	Jumlah Pemenuhan Bukti Dukung

LEVEL 5 AKTIVITAS

Fenomena	Kurangnya Pemahaman Dalam Penyusunan Dokumen
Sasaran	Terpenuhinya Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator	Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa

Fenomena	Kurangnya Penyelenggaraan Pelatihan JF PBJ
Sasaran	Terseleenggaranya Pelatihan JF PBJ
Indikator	Penyelenggaraan Pelatihan JF PBJ

Fenomena	Kurangnya Pembinaan Kepada Penyedia
Sasaran	Terlaksananya Pembinaan Kepada Penyedia
Indikator	Jumlah Penyedia yang Menerima Pembinaan

Fenomena	Belum optimalnya penyempurnaan rancangan Peraturan Perundang-undangan
Sasaran	Rancangan peraturan Perundang-undangan yang sudah disempurnakan
Indikator	Jumlah produk hukum daerah yang sudah ditetapkan

Fenomena	Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Sasaran	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
Indikator	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan 2. Indeks Reformasi Hukum 3. Nilai SAKIP

Fenomena	Masih kurangnya Kompetensi Asn Sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022 (Nilai 70,15))
Sasaran	1. Meningkatnya kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Re-Regulasi dan Deregulasi. Peraturan Perundang-Undangan
Indikator	1. Persentase perancang peraturan perundang-undangan yang tersertifikasi 2. Persentase hasil evaluasi re-regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti

Fenomena	Belum optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sasaran	1. Tersusunnya produk hukum daerah yang di fasilitasi (4 Jenis produk hukum) 2. Meningkatnya pendokumentasian produk hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Indikator	1. Jumlah produk hukum daerah yang disusun 2. Jumlah pengelolaan informasi hukum yang di dokumentasi

Fenomena	Masih kurangnya kualitas perencanaan pembangunan (Nilai komponen SAKIP : 23,55 - Murutol di catatan LHE 3 tahun berturut2)
Sasaran	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan

Fenomena	belum optimalnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
Sasaran	Meningkatnya kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses
Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Fenomena	Belum optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sasaran	Tersusunnya produk hukum daerah yang di fasilitasi (4 Jenis produk hukum)
Indikator	Jumlah produk hukum daerah yang disusun

Fenomena	Belum optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sasaran	Meningkatnya pendokumentasian produk hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Indikator	Jumlah pengelolaan informasi hukum yang di dokumentasi

Fenomena	Impelmentasi SAKIP OPD belum maksimal
Sasaran	Meningkatnya kualitas implementasi dokumen penyelenggaraan SAKIP
Indikator	1. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perjanjian Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku

Fenomena	Kurangnya kepatuhan PD terhadap prosedur pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Sasaran	Terlaksananya kepatuhan dalam pengajuan produk hukum daerah terhadap prosedur, sesuai dengan substansi dan tidak dengan peraturan yang lebih tinggi
Indikator	Jumlah produk hukum yang di fasilitasi

Fenomena	Belum optimalnya teknologi informasi untuk mempercepat pengelolaan informasi Hukum yang di dokumentasi
Sasaran	Terlaksananya kepatuhan dalam pengajuan produk hukum daerah terhadap prosedur, sesuai dengan substansi dan tidak dengan peraturan yang lebih tinggi
Indikator	Jumlah produk hukum yang di fasilitasi

Fenomena	Kurangnya pemahaman PD terkait penyusunan dokumen implementasi SAKIP yang sesuai ketentuan
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas dokumen perjanjian kinerja PD 2. Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan kinerja OPD
Indikator	1. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja 2. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan penyusunan laporan kinerja

Fenomena	Belum optimalnya kualitas fasilitasi evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa
Sasaran	Tersusunnya bahan rekomendasi hasil klarifikasi Peraturan Desa
Indikator	Jumlah rekomendasi hasil klarifikasi Peraturan Desa

Fenomena	Belum optimalnya pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Sasaran	Optimalisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dengan menggunakan standar metadata
Indikator	Jumlah produk hukum yang diinput pada aplikasi JDHI

Fenomena	belum seluruhnya perangkat daerah menyusun perjanjian kinerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
Sasaran	Penyiapan bahan pembinaan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja
Indikator	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja

Fenomena	belum seluruhnya perangkat daerah menyusun laporan kinerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
Sasaran	Penyiapan bahan pembinaan penyusunan dokumen laporan Kinerja
Indikator	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja